



Perlawanan Ulama dan Petani terhadap Kebijakan Kenaikan Pajak oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Cimareme Garut, 1919

Moh. Iqbal Nafi,^{1*} Badrun¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*mohiqbalnafi@gmail.com

Dikirim: 19-11-2024; Direvisi: 11-02-2025; Diterima: 12-02-2025; Diterbitkan: 30-04-2025

Abstrak: Penelitian ini mengkaji Peristiwa Cimareme di Garut sebagai perlawanan terhadap kolonialisme Belanda pada awal abad ke-20. Melalui metode sejarah kualitatif, penelitian ini menelusuri latar belakang sosial-ekonomi masyarakat Cimareme yang mayoritas petani, serta kebijakan kolonial yang menekan seperti kewajiban jual padi, sehingga memicu perlawanan dari masyarakat Cimareme yang dipimpin oleh Haji Hasan Arif. Penduduk Cimareme yang mayoritas petani, hidup dalam tekanan kebijakan ekonomi kolonial yang memaksa mereka menjual hasil panen dengan harga yang merugikan. Penelitian ini dilakukan melalui tahapan pengumpulan data atau heuristik dari sumber kepustakaan, verifikasi terhadap keabsahan sumber, interpretasi fakta sejarah, serta historiografi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Peristiwa Cimareme tidak hanya merupakan perlawanan terhadap kebijakan kolonial yang merugikan petani, tetapi juga menunjukkan adanya semangat nasionalisme yang kuat di antara masyarakat Garut. Perlawanan ini memperlihatkan bagaimana tokoh agama, khususnya Haji Hasan Arif berperan penting dalam memobilisasi rakyat untuk menegakkan keadilan dan melawan eksploitasi kolonial. Meskipun perlawanan ini diikuti oleh penangkapan dan penindasan terhadap kyai, petani, santri, dan para haji, peristiwa ini menjadi simbol penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Cimareme memperkuat kesadaran kolektif masyarakat untuk bersatu melawan penjajahan dan menunjukkan bagaimana agama dan nasionalisme menjadi kekuatan pendorong dalam perjuangan menuju kemerdekaan.

Kata Kunci: Cimareme; ekonomi; kolonialisme; Ulama

Abstract: This research examines the Cimareme Incident in Garut as a resistance to Dutch colonialism in the early 20th century. Through qualitative historical method, this research traces the socio-economic background of the Cimareme of the Cimareme people who were mostly farmers, as well as the oppressive colonial policies such as the obligation to sell rice, which triggered resistance from the Cimareme people led by Haji Hasan Arif. The people of Cimareme, who were mostly farmers, lived under the pressure of colonial economic policies that forced them to sell their crops at disadvantageous prices. This research was conducted through the stages of data collection or heuristics from literature sources, verification of the validity of sources, interpretation of historical facts, and historiography. The results revealed that the Cimareme Incident was not only a resistance to colonial policies that harmed farmers, but also showed the strong spirit of nationalism among the Garut people. This resistance showed how religious figures, especially Haji Hasan Arif, played an important role in mobilizing the people to uphold justice and fight against colonial exploitation. Although this resistance was followed by the arrest and suppression of Kyai, Peasants, Santri, and Hajis, this event became an important symbol in the struggle for Indonesian independence. The Cimareme Incident strengthened the collective consciousness of the community to unite against colonialism and showed how religion and nationalism became a driving force in the struggle towards independence.

Keywords: colonialism; Cimareme; economy; Ulama



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Cimarama merupakan sebuah kampung yang berada di daerah pegunungan dengan kondisi tanahnya yang subur. Kehidupan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Lahan pertanian masyarakat Cimareme mendapatkan aliran air dari sungai Cimanuk dan Cibudug. Tanaman yang ditanam oleh penduduk Cimareme sangat beranekaragam, seperti padi, tembakau, jagung, ubi kayu, dan kacang-kacangan. Meskipun lahan pertanian masyarakat Cimareme tidak cukup luas, namun penduduknya tidak sampai mengalami kekurangan pangan (Kutoyo, 1983). Selain bertani, penduduk Cimareme bekerja sebagai pedagang dan buruh perkebunan sewaktu musim panen tiba. Penduduk Cimareme ini sangat menarik, pasalnya semenjak generasi yang lalu mulai dari kakek H. Hasan Arif sampai masa kemerdekaan Indonesia, tidak ada seorang pun warga Cimareme yang bekerja pada dinas pemerintahan Hindia Belanda (S, 1969).

Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 telah masuk modal asing yang menjadikan dataran tinggi Garut terlihat makin banyak perkebunan atau *onderneming* yang menjadi usaha bangsa asing, seperti perkebunan teh, kina dan karet, serta berdiri banyak pabrik. Hal ini menjadikan masyarakat mulai mengenal teknologi dan sistem ekonomi modern, sehingga masuk pulalah praktik-praktik sistem penjajahan dengan berbagai konsekuensinya (S, 1969). Ketika terjadi perang dunia I, kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Garut juga mengalami keguncangan. Dalam kondisi normal, apabila masyarakat mengalami kesulitan bahan pangan, dapat di atasi dengan bantuan atau pinjaman padi dari lumbung-lumbung desa. Namun, pada tahun 1917 saat itu sudah banyak lumbung desa yang ditutup, sehingga usaha pemerintah pada waktu itu dalam mengatasi kekurangan bahan pangan membuat kebijakan penyerahan wajib, yaitu wajib jual padi kepada pemerintah (Gonggrijp G, 1967).

Adanya aturan wajib jual padi itu dirasakan cukup berat oleh masyarakat pedesaan Garut, termasuk masyarakat Cimareme. Namun, mereka tidak berani menentang peraturan tersebut, sehingga mereka menjalankan perintah pihak pemerintah kolonial Belanda. Terkecuali satu orang dengan keberaniannya dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan bangsanya, yaitu Haji Hasan Arif dengan lantang menentang kebijakan Belanda tersebut demi pembelaannya terhadap keadilan, kemerdekaan, dan harga diri. Waktu itu yang menjabat sebagai Bupati Garut adalah R.A.A. Suria Kartalegawa (1915-1929) yang menjadi bupati ke-5 sejak tahun 1813. Ketika ia menjabat sebagai bupati Garut, Garut mengalami masa yang sulit sebab berlangsung Perang Dunia I. Hal ini berdampak pada kehidupan perekonomian rakyat yang semakin berat dan pergerakan kebangsaan Indonesia juga semakin keras, sehingga membuat pemerintah Hindia Belanda mengerahkan aparatnya untuk menghadapi pergerakan rakyat. Bupati R.A.A. Suria Kartalegawa ini sangat berorientasi kepada pihak Belanda, tidak memperhatikan kehidupan rakyatnya, seperti yang dibuktikan atas sikapnya terhadap Haji Hasan Arif (Kutoyo, 1983).

Dampak perang Dunia mengakibatkan pemerintah Kolonial Belanda menghadapi ancaman serius yang mengganggu stabilitas politik, pertahanan, dan ekonomi. Pemerintah kolonial sangat khawatir terhadap kemungkinan agresi dari negara lain dan terjadinya perang di wilayah Belanda maupun di Hindia. Hal itu mengakibatkan terjadinya krisis dan kemerosotan ekonomi, kekacauan dalam perdagangan internasional, dan inflasi yang tidak

terkendali. Bidang politik, lemahnya pemerintahan memicu perpecahan dan pemberontakan dari masyarakat pribumi. Mereka menyadari adanya dampak perang ini tidak hanya berupa eksploitasi ekonomi, melainkan juga lemahnya kekuatan militer (Nuraidah, 2023).

Konteks masa lalu, karakter pemerintahan kolonial yang eksploitatif dalam hal perpajakan tanpa memberikan distribusi manfaat secara adil sering kali memicu perlawanan dari masyarakat. Salah satu contohnya ialah peristiwa Cimareme di Garut, Jawa Barat, pada tahun 1919. Menurut Sartono Kartodirdjo, peristiwa ini termasuk dalam kategori gerakan nativistik pada era radikalisme agraria di bawah kepemimpinan Haji Hasan Arif (Sartono Kartodirdjo, 1972). Peristiwa Cimareme ini mengakibatkan banyak haji, kiai, dan santri yang ditangkap dan dibawa ke pengadilan di Kota Garut, baik sebagai terdakwa ataupun sebagai saksi (Iskandar, 2001). Hasil investigasi pemerintah Hindia Belanda, terungkap bahwa Haji Hasan Arif bersama puluhan haji dan kiai lainnya di wilayah Priangan terlibat dalam gerakan Sarekat Islam (SI) Afdeling B.

Urgensi dari penulisan artikel ini untuk memahami lebih dalam dinamika perlawanan masyarakat lokal, khususnya kaum petani dan kiai terhadap kebijakan kolonial yang sangat menyengsarakan perekonomian rakyat pribumi akibat adanya kebijakan kenaikan pajak tersebut. Beberapa hasil kajian terdahulu, seperti kajian yang dilakukan oleh Dharyanto Tito Wardani (2016) “Peranan Surat Kabar Soerapati dalam Perlawanan Intelektual Pribumi di Jawa Barat Tahun 1923-1925”. Dalam penelitian ini, dijelaskan bagaimana surat kabar ini digunakan oleh organisasi berideologi komunis untuk melawan pemerintah kolonial. Karya dari Sherly Nursyamsi dan Lisa Rukmana (2023) “Perjuangan Rakyat Pulau Tengah Melawan Kolonial Belanda pada Tahun 1901-1903”. Tulisan ini mengupas tentang peranan masyarakat adat dan ulama dalam menegakkan peraturan sebelum kedatangan Belanda, serta bagaimana kolonialisme merubah struktur masyarakat. Dan karya Syahrul Rahmat (2021) “Perlawanan Ulama Minangkabau terhadap Kolonialisme Belanda Abad XIX-XX”. Tulisan ini membahas tentang konflik antara kaum adat dan agama di Minangkabau pada abad ke-19 hingga ke-20, serta bagaimana ulama berjuang menentang penjajahan melalui pelbagai bentuk perlawanan. Kebaruan dari tulisan ini adalah difokuskan pada melihat dampak ekonomi akibat kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat krisis dari adanya Perang Dunia I.

Dari uraian latar belakang di atas menunjukkan bahwa kekejaman pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat pribumi sangat kejam, sehingga menimbulkan perlawanan dari adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Maka dari itu, tulisan ini ditulis sebagai tambahan kajian mengenai perlawanan atau perjuangan pribumi dalam melawan penjajahan kolonial Belanda. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait perjuangan para ulama, petani, dan santri dalam melawan kebijakan pajak kolonial Belanda yang mengakibatkan kondisi perekonomian memburuk, terkhusus di wilayah Garut, Jawa Barat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang dipaparkan secara kualitatif dalam proses pengumpulan data (heuristik dan kritik sejarah), antara deskripsi dan analisis dalam interpretasi fakta sejarah, sehingga menjadi satu kesatuan dalam penulisan sejarah (Abdurahman, 2019). Adapun tahapan metode penelitian sejarah terdapat empat tahap, pertama heuristik, yaitu melakukan pencarian sumber-sumber untuk mendapatkan data-data sejarah atau evidensi sejarah (Rochmat, 2009). Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*) dengan mencari sumber-sumber sejarah di perpustakaan, artikel, dan arsip-arsip. Selanjutnya verifikasi, yaitu memberikan kritik terhadap sumber yang di dapat untuk memperoleh keabsahan dan keorisinilan melalui kritik intern dan kritik ekstern. Dalam

melakukan verifikasi sumber, nantinya akan dipertimbangkan apakah sumber primer atau sumber sekunder mengenai informasi yang diberikan tentang peristiwa sejarah tersebut (Abdurahman, 2019). Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip surat kabar dan beberapa arsip dari KITLV, sedangkan sumber sekundernya berupa buku, karya akademik, artikel, yang berhubungan dengan tema penelitian. Setelah sumber-sumber yang didapat lolos dari kritik intern ataupun kritik ekstern, tahapan selanjutnya adalah melakukan penganalisisan atau penafsiran karena fakta sejarah tidak dapat berbicara sendiri. Dalam tahap ini penulis melakukan penetapan fakta-fakta sejarah yang dianggap bermakna yang saling berkaitan antara satu fakta sejarah dengan fakta lainnya. Tahap terakhir, yaitu historiografi penulis menyajikan hasil sintesis yang didapat dalam bentuk tulisan sejarah. Pemaparan bentuk tulisan sejarah mempunyai tiga bagian, yaitu pengantar, hasil penelitian, dan kesimpulan (Kuntowijoyo, 2018). Pada tahap ini, diperlukan kemampuan agar fakta-fakta sejarah yang sudah benar-benar terpilih, namun masih bersifat fragmentasi dapat menjadi suatu sajian yang bersifat utuh, sistematis, dan komunikatif.

Hasil Penelitian

Kondisi Umum Garut

Masuknya pemerintah kolonial Belanda mengakibatkan perubahan dan keguncangan dalam kehidupan masyarakat pribumi. Masuknya ekonomi uang membuat beban rakyat semakin berat dan memudahkan pelaksanaan pemungutan pajak serta lahirnya buruh upah. Sistem penyewaan tanah dan praktik kerjapaksa memperberat kehidupan masyarakat pedesaan, sehingga kesejahteraan hidup makin merosot dan menimbulkan kemiskinan (Kutoyo, 1983). Tidak mengherankan, pada waktu itu di daerah kecamatan Samarang, kabupaten Garut telah bangkit perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda yang dipimpin oleh Raden Kusumah Argodipo, seorang tokoh penguasa tradisional (S, 1969). Pada tahun 1913 kesadaran politik mulai tumbuh di kalangan masyarakat luas, dibuktikan dengan adanya pendirian cabang Budi Utomo di Garut oleh M. Sudirdja dan Raden Anggakusumah. Akan tetapi perkumpulan ini kurang berkembang, sehingga ketika Sarekat Islam (SI) berdiri di Garut banyak anggotanya yang beralih ke organisasi kesilaman yang baru itu (Kutoyo, 1983).

Awal abad ke-20 membuat sebuah pergerakan yang berbeda, yakni adanya penetrasi kolonial yang masuk dalam kehidupan sehari-hari dengan intensif membayar pajak yang sangat berat. Kebijakan-kebijakan yang menindas buruh dan berlebihan dalam memperkerjakannya membuat masyarakat untuk lebih aktif dalam melakukan penolakan dan perlawanan. Situasi politik pada saat itu mempunyai tiga kebijakan, yaitu kebijakan pendidikan, kebijakan emigrasi, dan irigasi. Kebijakan pendidikan tersebut melahirkan sistem pendidikan yang rasis, memecah belah bangsa dengan mendirikan Sekolah Dasar Eropa, yaitu sekolah untuk anak-anak Eropa, negara Asia Timur yang asing, dan juga anak-anak elit priyayi atau bangsawan Jawa. Sementara di Garut awal abad ke-20 muncul sekolah Tionghoa di Lio dan *Christelijk Hollandsche Inlandsche Chinese School* yang berada di sebelah barat Pasar Baru (Nuraidah, 2023). Selain itu, di Garut juga berdiri sekolah untuk para wanita dan anak-anak remaja putri yang bernama Sekolah Keutamaan Istri (1910) yang didirikan oleh Raden Ayu Lamingrat mengikuti jejak Raden Dewi Sartika (S, 1969).

Masyarakat Garut dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu Pribumi (99,7%), Eropa, dan Timur Asia (0,3%) yang tersebar di berbagai wilayah. Penduduk pribumi sendiri digolongkan menjadi dua golongan: golongan atas (*menak*) dan golongan bawah (*somah*). Dalam hal pendidikan pendudukan pribumi paling rendah, sehingga bangsa Eropa terkhusus kolonial Belanda menjadi penguasanya dan menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu

membuat sebuah golongan melawan dan memberontak atas pemerintahan kolonial dan puncaknya pada peristiwa Cimareme yang mengagetkan bagi bangsa Eropa di luar dari Indonesia (Nuraidah, 2023).

Pada tahun awal abad ke-20, Islam menjadi agama mayoritas bagi masyarakat Indonesia yang tengah mengalami penjajahan dari kolonial. Dalam hal ideologi, semangat Islam menjadi dasar utama dalam melawan penjajahan kolonial Belanda. Para Kyai dan santri dengan pengikut gerakan ajaran tarekat menjadi garda terdepan dan pelopor untuk melawan penjajahan kolonial Belanda, sehingga terjadi konflik dengan motif fanatisme agama yang terjadi beberapa kali sampai ratusan kali (Nuraidah, 2023). Fanatisme keagamaan masyarakat Garut sendiri sangat kuat, banyak pesantren di Garut yang berjiwa menentang penjajahan kolonial Belanda. Maka dari itu, Sarekat Islam (SI) dapat berkembang dengan cepat dan subur di Garut sebab sefrekuensi dengan cita dan pandangan hidup masyarakatnya (Kutoyo, 1983).

Kondisi Ekonomi Garut

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Garut adalah sebagai petani, sebab sektor pertanian merupakan sektor yang mudah dikerjakan. Rata-rata masyarakat Garut pada waktu itu pendidikannya sangat rendah, sehingga untuk bekerja di sektor perdagangan atau pegawai pemerintahan dirasa cukup sulit. Daendels merupakan jenderal yang berkuasa pada saat itu, ia sangat kejam dan bengis, mengambil hak-hak petani dengan tidak membayarnya, apabila dibayar itu pun sangat jauh dengan upah semestinya. Hal inilah yang menyebabkan orang pribumi geram atas perbuatannya, sehingga terjadi pemberontakan yang menuntut agar diringankan pekerjaannya dan dari pemberontakan itu mengakibatkan 60 pemberontak tewas, 100 luka-luka, dan 500 ditawan (Nuraidah, 2023).

Tahun 1904 pasar di Priangan yang menjadi poros perputaran perekonomian ada sekitar 272 pasar dan pada tahun 1905 jumlah pasar di Priangan bertambah menjadi 273 pasar, sehingga hal ini menjadikan perekonomian di Garut meningkat. Pada saat itu, Garut menjadi keresidenan di Priangan terkhusus Jawa Barat yang mengalami perkembangan pesat dalam sektor perekonomian perdagangan (Hardjasaputra, 1990). Perkembangan perekonomian Garut pada saat itu tidak terlepas dari peran dan kontribusi pengusaha pribumi. Mereka mayoritas merupakan pendatang dari kota-kota di Jawa Tengah, di antaranya Dasiman atau Pak Masini, ia merupakan bapak dari H.M. Djamhari seorang pendatang dari Kudus, kemudian Haji Sirad, Haji Abdullah, pendatang dari Pekalongan Jawa Tengah, H. Kamil dan keluarga Haji Iton dari Cirebon, Jawa Barat (Sardjono, 1968).

Melihat perkembangan perekonomian perdagangan di Garut menjadi daya tarik bagi pengusaha Eropa dan Asia Timur, sebab Garut merupakan kota yang baru dibentuk namun perekonomiannya berkembang pesat. Orang Tionghoa yang tinggal di Garut, pada tahun 1895 sebenarnya telah memetakan masyarakat tempat ia tinggal dengan berdagang di desa Sukaregang Hilir, kemudian pada tahun 1930 jumlah orang Tionghoa bertambah banyak, diperkirakan mencapai ribuan kurang lebih 503 rumah tangga (Hidayat, 2015). Garut menjadi kawasan industri yang mempunyai banyak pabrik, di antaranya pabrik sabun Dralle, sabun Nansen, pabrik Rokok Faroka, dan pabrik Cokelat Ceres. Di sisi lain, Garut juga menjadi kota jasa dan kawasan pariwisata dapat dilihat dengan adanya sejumlah bangunan, seperti hotel dan penginapan, gedung bioskop, dan bangunan *Societeit Inta Montes* (Katam & Affandhi, 2013). Hal tersebutlah yang menjadikan Belanda berkepentingan mengeruk keuntungan ekonomi dari Garut, kebijakan Belanda lebih banyak mendapat keuntungan dari suburnya daerah jajahannya serta keuntungan dari perdagangan dari pada dengan pengusaha pribumi (Hardjasaputra, 1990).

Jenderal Deandels yang terkenal dengan kebengisannya, pada tahun 1918 selalu memantau buruh pribumi dan apabila ada yang melakukan pemberontakan pasti ditangkap. Orang-orang pribumi di pekerjaan oleh Deandels untuk membuat jalan sampai Banyuwangi. Selain itu, juga dibentuk Dewan Rakyat (*Volksraad*) yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi pribumi, namun para priyayi yang menduduki jabatan di Dewan Rakyat (*Volksraad*) lebih mementingkan keutamaannya, dari pada kepentingan rakyat pribumi (Nuraidah, 2023).

Basis perekonomian Garut adalah agraris, sehingga mayoritas penduduk Garut berprofesi sebagai buruh tani. Pekerjaan mereka adalah menanam padi, target panennya dalam waktu dua tahun adalah tiga kali panen. Umumnya mereka hanya mempunyai sawah seluas 200 bata dengan hasil panen 1000 kg padi, ongkos penggarapannya 300 kg, jadi tinggal 700 kg. Dengan sisa hasil panen 700 kg tersebut, petani harus mencukupi kebutuhan keluarganya, baik sandang, pangan, ataupun lainnya (Kutoyo, 1983). Berbeda dengan petani yang berada di lereng pegunungan yang kering, mereka menanam singkong, kedelai, jagung, palawija, cabai, kacang tanah, dan juga kentang, yang menjadi komoditas yang terkenal di Garut vanili dan jeruk Garut. Para petani Garut menjual hasil panennya keluar daerah Garut, seperti ke Batavia bahkan sampai ke Eropa (Hayati, 1990). Setelah perang Dunia I, tepatnya tahun 1911 dunia mengalami krisis sehingga pemerintah Hindia Belanda membentuk Komite Hindia Siaga atau *Indie Weerbar*, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak dari adanya Perang Dunia I. Pada waktu itu bertepatan kemarau panjang, sehingga mengakibatkan tanaman padi petani gagal panen yang menyebabkan kekurangan beras. Dengan begitu, pemerintah Kolonial Belanda membuat kebijakan berupa kewajiban menjual pada kepada pemerintah, faktor inilah yang menyebabkan penentangan dari pribumi dan disarankan untuk tidak membayar kas komite I.W. karena tidak membantu dalam hal keikutsertaan perang dunia. Perihal mengenai kebijakan wajib menjual hasil panen padi kepada pemerintah, H. Hasan Cimarame sangat menentang terhadap kebijakan tersebut, sehingga terjadilah peristiwa Cimarame (Nuraidah, 2023).

Pada saat itu perekonomian sangat mengkhawatirkan, barang-barang naik semua terkhusus bahan makanan pokok, bahan bangunan dan barang-barang seperti pakaian serta lainnya pun ikut naik (Nuraidah, 2023). Hal itu membuat kondisi perekonomian rakyat makin terpuruk, banyak pengangguran yang tidak tertampung. Dalam situasi dan kondisi yang penuh emosi sebab kehidupan petani dan masyarakat lainnya tidak menunjukkan harapan, maka pernah terjadi segolongan masyarakat yang terdiri dari anggota-anggota Sarikat Islam menyerang dan merusak sebuah kantor penampungan kuli, sehingga kantor tersebut ditutup (S, 1969). Waktu itu, suasana hati masyarakat Cimarame penuh dengan perasaan menentang penjajah sebab kondisi ekonomi masyarakat semakin suram dan pemerintah Belanda semakin menekan pergerakan kebangsaan.

Mobilisasi Masa oleh Ulama

Haji Hasan Arif merupakan keturunan bangsawan dari Kyai Tubagus Alpani pimpinan pesantren Cimarame. Ia merupakan cucu dari Kartanudin yang awalnya bernama Kartaningrat, semula seorang pegawai pemerintah kolonial Belanda yang pada akhirnya memutuskan untuk berhenti sebab tidak sepaham dengan pemerintah kolonial Belanda dan setelah itu memfokuskan dirinya mengurus lembaga pendidikan agama (Nuraidah, 2023). Haji Hasan Arif seorang yang kaya, pemberani berwatak ksatria, membela keadilan, demokratis dan rasa kemanusiaannya yang tinggi, sehingga mempunyai jiwa membela masyarakat dan kaum lemah, terutama sesama bangsanya. Pada masa mudanya, ia pernah menghalang-halangi dan menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda membuat jalan baru dengan membendung Situ Cibudug. Menurutny, rencana pemerintah kolonial Belanda

tersebut dapat menyebabkan sawah-sawah di desa Sukasari, Leuwigoong, dan Dungusiku kesulitan air yang bisa menyebabkan para petani di desa-desa tersebut sengsara (Sutrisno Kutoyo, 1983). Sikapnya tersebut hampir saja menewaskan dirinya, sebab kontrolir Belanda pada saat itu marah dan akan menembakkan pistol kepadanya (S, 1969).

Amanah dari kakeknya yang diturunkan turun temurun menjadi pegangan dalam kehidupannya, yakni tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Awal mula Haji Hasan Arif melakukan perlawanan berawal dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan penjualan padinya sebanyak 42 pikul. Namun ia keberatan dan hanya menjual padinya 10 pikul karena ia harus menanggung keluarganya sebanyak 84 orang (Kaoem Moeda, 1920). Haji Hasan Arif mengajukan keberatan dengan menulis surat melalui Lurah Cikendal kemudian disampaikan kepada Wedana Leles, namun hal itu ditolak oleh pemerintah setempat (Nuraidah 2023). Pemerintah tetap pada keputusannya dan bakal menindak tegas bagi yang membangkang. Ancaman tersebut benar dilakukan dengan mengirimkan pasukan bersenjata untuk menangkap Haji Hasan Arif, sebab Haji Hasan Arif tetap pada pendiriannya (Iskandar, 2016).

Perang dunia (1914-1918) mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi, dampaknya terasa bukan hanya bagi negara-negara yang ikut terlibat langsung dalam perang, melainkan juga berdampak bagi daerah-daerah di luarnya termasuk Indonesia yang menjadi tanah jajan Belanda. Salah satu dampaknya ialah bahan mentah dari Indonesia menumpuk tidak dapat di ekspor dan perusahaan banyak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya sehingga banyak pengangguran. Kehidupan rakyat semakin sulit, persediaan beras menipis karena impor tidak kunjung datang, dan mengakibatkan harga beras naik drastis serta mulai terjangkit kelaparan (Koch, 1951).

Melihat kondisi tersebut, Kyai Haji Hasan Arif mulai melakukan peningkatan kegiatan dalam rangka persiapan diri. Ia menjelaskan kepada para santri, keluarga, dan masyarakat, bahwa Eropa sudah pecah perang dan berharap Belanda ikut andil dalam peperangan tersebut, sehingga kalau ikut perang niscaya kekuatannya di Indonesia menjadi lemah. Kyai Haji Hasan Arif berharap seluruh elemen bangsa dapat bersatu padu di saat Belanda lemah. Ia berpendapat dengan berkaca pada sejarah, jika suatu negara sedang sibuk menghadapi peperangan, biasanya terjadi perubahan kenegaraan baik di negara itu sendiri ataupun di wilayah jajahannya. Haji Hasan Arif melihat tanda-tanda itu pada pemerintahan Belanda, meskipun sebenarnya ia tidak membenci orang Belanda, namun tidak suka dengan sistem penjajahannya semestinya mereka mempunyai rasa kemanusiaan dalam dirinya masing-masing (Kutoyo, 1983).

Haji Hasan Arif terus mengobarkan semangat sebisa mungkin dan semampunya agar tujuan Belanda tersebut dicegah. Hal ini berdampak positif, kesiapsiagaan ini membawa angin segar yang membangunkan semangat bagi golongan-golongan dari bangsa Indonesia yang masih tidur. Peran Haji Hasan sebagai pengambil inisiatif sikap kepeloporan perjuangan diharapkan dapat diikuti oleh kelompok bangsa Indonesia yang lainnya. Ia berkata supaya tidak takut mati dalam melawan Belanda, karena semua itu dilakukan demi membela tanah air dan menjunjung agama, sebab hukumnya wajib melawan penjajah. Berjuang melawan penjajahan Belanda jangan didasarkan pada menang atau kalah, akan tetapi harus didasarkan pada hak kewajiban membela tanah air dan berniat perang di jalan Allah dalam membela agama. Itulah bentuk persiapan mental dan spiritual yang ditanamkan oleh Kyai Haji Hasan Arif dalam menyongsong melawan Belanda (Kutoyo, 1983).

Sementara pada waktu itu terjadi kemarau panjang yang membuat petani gagal panen dan juga kekurangan beras (pangan), sehingga mengakibatkan kondisi masyarakat semakin sengsara, bahaya kelaparan mulai terasa dengan stok bahan pangan mulai langka. Kekeringan

panjang di tengah musim hujan terjadi pada akhir tahun 1918, sehingga menyebabkan keterlambatan panen 1,5 bulan di tahun 1919. Masalah kekurangan pangan ini terjadi pada tahun 1918 sampai 1919 yang tidak bisa di tangani dengan baik oleh pemerintah kolonial Belanda. Masyarakat dibayang-bayangi oleh rasa takut kekurangan pangan dan kekhawatiran bahaya kelaparan yang semakin meluas hampir merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada waktu itu, penjualan beras di Garut tidak dijual secara bebas, namun harus dibeli di kabupaten (Nuraidah, 2023).

Hal ini membuat pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1918 menerbitkan kebijakan wajib jual padi, para petani dipaksa menjual padinya kepada pemerintah sebanyak empat pikul (6,5 kg) per bahu ($\pm 700m^2$ atau 500 bata) dengan harga ditentukan pemerintah (S, 1969). Masyarakat menyebut peraturan tersebut dengan istilah setopan, sebab keseluruhan lumbung padi milik rakyat di tutup (disegel) dan tindakan tersebut sangat menusuk hati kaum pribumi. Motivasi pemerintah Belanda menerapkan kebijakan tersebut bukan untuk mengatasi kelaparan rakyat demi kesejahteraan, namun semata-mata merupakan ketakutan Belanda terhadap rakyat yang berada pada pusaran kelaparan melakukan pemberontakan kepada pemerintah.

Kebijakan tersebut juga berlaku di Cimareme dengan perantara lurah desa Sukasari, Wiraatmadja. Ketika peraturan ini berlaku di Cimareme, Haji Hasan Arif mengajukan keberatan atas kebijakan itu dengan berpesan kepada lurah Sukasari agar menyampaikannya kepada camat Banyuwesmi. Menurut pandangan Haji Hasan Arif, adanya kebijakan yang mengharuskan rakyat menyetorkan hasil panen padi sebanyak itu dapat mengakibatkan rakyat semakin kesulitan dalam hal persediaan pangan. Adanya kebijakan itu membuat Haji Hasan Arif harus menyetorkan 40 pikul (2,5 ton) dari luas sawahnya 10 bahu. Setiap bahu setara 500 bata, sementara hasil panen setiap bata adalah 5 kg padi. Dengan demikian, setiap panen (8 bulan sekali) Haji Hasan Arif mendapatkan padi $5000 \text{ (bata)} \times 5 \text{ kg} = 25.000 \text{ kg}$ (Naskah Panitia, 1973). Berbeda dengan lahan milik rakyat yang rata-rata luas sawahnya 200 bata dengan hasil panen 1.000 kg, biaya ongkos penggarapan 300 kg, sehingga tersisa 700 kg. Dengan sisa hasil panen 700 kg itu petani harus mencukupi kebutuhan keluarga (sandang, pangan, dan papan), apabila pemerintah menerapkannya tadi berarti tersisa 600 kg untuk hidupnya dan pastinya ini sangat berat, sehingga dapat mengguncang perekonomian rakyat.

Melihat kondisi tersebut, Haji Hasan Arif menyadari bahwa situasi sudah cukup darurat dan dapat menyebabkan terjadinya peristiwa besar yang menimpa ia sendiri, kerabat, sahabat, murid-murid ataupun masyarakat Cimareme. Oleh sebab itu, Haji Hasan Arif mengumpulkan seluruh elemen Cimareme yang tergabung dalam perkumpulan Cimawa Rame, karena ia menyadari pemerintah Belanda akan melakukan tindakan kekerasan. Banyak tokoh yang hadir, di antaranya: Adikarta alias Haji Manan, Adinata alias Haji Manap, Atmaka, Warga alias Haji Hasanuddin, Haji Syamsuri, Jayadikarta, Haji Gojali, Udi, Iyiguna, Haji Sobandi, Amri, Haji Bakar, Haji Said, Marhasan, Memed alias Haji Ahmad, Muazim, Jatma, Haji Rozak, Wira, Padma, demikian pula kaum wanita, seperti: Ny. Haji Romlah, Ny. Haji Juhro, Ny. Eha, Ny. Imas, Ny. Ornasih, Ny. Itri, Ny. Haji Fatimah, Ny. Haji Ening (Sutrisno Kutoyo, 1983). Sementara para cucunya juga ikut bersiaga, di antaranya: Maksum, Mita, Pia, Banda. Encun, Oha, Uju, Muhid (Haji Maulani), Abdul Kohar, Ero, Sahro, Angga, Osin, Endi A, Endi B, Suro (Naskah Panitia, 1973). Kemudian nama perkumpulan rahasia ini diubah menjadi Cimimite Rame.

Di sisi lain, Haji Hasan Arif masih memutar otak mencari jalan terbaik dengan mengirim surat kepada Bupati Garut R.A.A. Suria Kartalegawa yang berisi permintaan agar pemerintah mempertimbangkan saran warga Cimareme, yaitu meringankan setoran padi

menjadi satu pikul per bahu. Ketika menunggu balasan surat dari Bupati Garut, Haji Hasan Arif melakukan persiapan dengan menugaskan Atmaka, Haji Gojali, dan Haji Syamsuri untuk menyiapkan golongan pemuda dan masyarakat di Desa Sukasari. Mereka juga menghubungi sahabat-sahabat Haji Hasan Arif di tempat lain, hal itu mendapat sambutan yang luar biasa dengan didatangkannya bala bantuan pejuang dari Cirebon, Mononjaya, Ciames, Karawang, Banten, Ciawi, Tasikmalaya, Limbangan, Nangkapait, Boyongbong, Godog, dan Rancabango (Kutoyo, 1983). Pada akhirnya surat tersebut tidak mendapat balasan dari Bupati Garut, tetapi mengirimkan Wedana Leles Raden Kusumahardja dengan membawa pesan kepada Haji Hasan Arif. Wedana Leles bersikap keras dan memerintahkan agar taat pada kebijakan pemerintah, kemudian terjadilah perdebatan hebat yang disaksikan oleh Ajengan Elim. Pada akhirnya Wedana Leles mengancam akan membunuh Haji Hasan Arif, apabila tidak mengikuti peraturan pemerintah. Haji Hasan Arif hanya berniat menuntut keadilan dan memperjuangkan keringanan sesama anak bangsa, namun justru mendapat penolakan dan bahkan diancam akan ditembak mati. Maka dari itu, sebagai makhluk ciptaan Allah berhak melawan sekuat tenaga (Naskah Panitia, 1973). Jawaban tersebut membuat Wedana Leles marah dan pergi tanpa pamitan.

Sesudah kejadian itu, Haji Hasan Arif bermusyawarah dengan para pengikutnya untuk menentukan sikap, apakah akan menyerah kepada Belanda, apakah akan melarikan diri ke tempat yang aman, ataukah melawan dengan semampunya?. Akhirnya pilihan jatuh pada yang terakhir, yakni melawan dengan sekuat tenaga dengan melakukan perang sabil. Semua itu semata-mata untuk mempertahankan harga diri sebagai bangsa dan sebagai seorang Muslim yang dijajah serta diberlakukan dengan penuh ketidakadilan oleh penjajah. Ajakan Haji Arif ini mendapat respons positif dari para sahabatnya, sejak Kamis sore sudah banyak yang berdatangan ke Cimareme dengan membawa pasukan bersenjata tajam dan berpakaian putih yang dipimpin kyainya masing-masing, sehingga membuat kampung Cimareme semakin rame dengan golongan pemuda-pemuda. Mereka mendapat motivasi semangat agar tidak gentar, sebab ini adalah perjuangan membela keadilan dan kebenaran, membela rakyat dan membebaskan dari bengisnya para penjajah. Selanjutnya Haji Hasan Arif juga berpesan: “apabila ia gugur dalam medan pertempuran mendahului semuanya, maka perlawanan terhadap Kolonial Belanda harus tetap di lanjutkan sampai melahirkan keadilan, dengan ini saya menyatakan berlakunya perang jihad fi sabilillah melawan Belanda” (Kutoyo, 1983).

Dampak Peristiwa Cimareme

Peristiwa Cimareme mencerminkan sosok kepribadian bangsa Indonesia yang pada hakikatnya tidak senang hidup dalam kekangan penjajah. Apabila mereka diperlakukan semena-mena dan harga dirinya di injak-injak, maka bangsa Indonesia pasti akan melakukan perlawanan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa selain cinta dengan kedamaian bangsa Indonesia juga lebih cinta akan kemerdekaan. Peristiwa Cimareme merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Pergerakan Nasional menuju Indonesia merdeka, yang mana asas tujuan dan Pergerakan Nasional itu juga menjadi asas tujuan dan jiwa peristiwa Cimareme itu sendiri. Peristiwa Cimareme ini merupakan peristiwa bersejarah yang patut dikenang, dengan para pahlawan yang telah menunjukkan jiwa patriotismenya dan heroisme yang tinggi.

Buntut dari peristiwa Cimareme ialah banyak haji, kyai, santri, dan masyarakat yang ditangkap serta diadili di pengadilan Garut (Iskandar, 2001). Di sisi lain, Haji Hasan Arif telah gugur dalam peristiwa Cimareme ditembak tepat di kepalanya oleh pasukan Marsose yang pada saat itu ia sedang shalat menghadap Rabb-nya. Melihat keonaran tersebut membuat Haji Bakar, Udin, dan Saedi melakukan perlawanan, namun usaha mereka tidak membuahkan hasil dan akhirnya mereka semua syahid dalam peristiwa itu. Mengetahui hal itu, pasukan

Marsose menghentikan tembakan dan kemudian mereka memeriksa rumah Haji Hasan Arif untuk menangkap para pengikut Haji Hasan Arif. Mereka di tawan serta dirantai untuk dibawa ke Garut, akan tetapi ada satu pembantu Haji Hasan Arif yang berhasil meloloskan diri, yaitu Atmaka (Kutoyo, 1983).

Terdapat tujuh orang yang gugur dalam peristiwa Cimareme tersebut, di antaranya: Haji Hasan Arif, Haji Bakar, Intasim, Sukanta, Udin, Saedi, dan Engko. Dan untuk jasad atau jenazah dari Haji Bakar dibawa oleh pasukan Marsose, sehingga sampai sekarang tidak diketahui dimana makamnya. Selain itu, buntut dari peristiwa Cimareme ini ialah terdapat 22 orang terluka akibat tembakan pasukan Marsose, di antaranya: Nyi Lamrah, Nyi Ratna, Nyi Ornasih, Oko, Kohar, Haji Ahmad, Angga, Jumarto, Uho, Wiharja, Rasman, Rabnas, Ijiguna, Banda, Nyi Gandik, Nyi Eneh, Amri, Encem, Andi, Amsari, Unen, dan Wardja. Dan terdapat 33 orang yang ditawan, mereka ditahan selama 2 tahun dan setelah itu barulah perkaranya disidangkan. Itu semua merupakan perjuangan serta keberanian dari anak Haji Hasan Arif yang bernama Nyi Julaiha dan Nyi Haji Juhro, mereka berdua datang langsung ke istana Gubernur Jenderal di Bogor dan mendesak supaya para tawanan disidangkan. Bahkan mereka berdua rela mengorbankan dirinya (ditembak mati) mengikuti ayah/suami/dan saudaranya (Kutoyo, 1983).

Pada tahun 1919, pemerintah Belanda melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai ikut andil dalam organisasi Sarekat Islam Afdeeling B. Seperti halnya di Desa Nangkapait banyak dilakukan penangkapan dengan banyaknya temuan baju putih, senjata, dan jimat. Sementara di Garut terdapat 2 orang komisarisi SI yang ditangkap dan puluhan anggota SI yang dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian mengenai 33 tahanan dari Cimareme yang diwakili oleh Haji Hasanuddin (warga), Atmaka, dan Haji Gojali dalam sidang-sidang yang telah berlangsung, mereka didakwa bersalah telah melawan pemerintah Belanda dan bersekutu dengan Sarekat Islam Afdeeling B. Sebenarnya tidak ada bukti kuat yang menyatakan bahwa mereka bersekutu dengan Sarekat Islam Afdeeling B, namun mungkin dilihat dari persamaan caranya dalam menentang penjajahan dengan menggunakan kekerasan dan membela keadilan. Pemerintah Belanda dalam surat Residen Priangan Timur dibuktikan melalui de Steurs kepada Gubernur Jenderal Van Limbunng Stirum, mengakui bahwa antara peristiwa perlawanan Haji Hasan Arif (peristiwa Cimareme) dengan Gerakan Sarekat Islam *Afdeeling* B tidak boleh dianggap sama serta tidak boleh di satukan. Kedua peristiwa tersebut tidak ada kaitannya dan saling berdiri masing-masing (Sarekat Islam Lokal, 1975).

Melalui proses persidangan, para pengikut Haji Hasan Arif dijatuhi beberapa hukuman, seperti: Haji Gojali dihukum 15 tahun di pulau Ai, dan sampai sekarang tidak ada kabar atau informasi mengennainya, Atmaka dijatuhi hukuman 5 tahun di Sawah Lunto, Haji Manan, s.d.a. Haji Manaf, s.d.a. Jayadikarta, s.d.a. Haji Hasanuddin, s.d.a. Haji Syamsuri dijatuhi hukuma 5 tahun di Glodok Jakarta, Iyuguna, s.d.a., Angga dihukum 3 tahun di Medan, Maksum, s.d.a. Omo, s.d.a. Madsahri, dihukum tiga tahun di Sawah Lunto (meninggal di pembuangan). H.M. Achmad, dihukum dua tahun di Jember. Idris, s.d.a. Rabnas, s.d.a. War'i, s.d.a. Aja, s.d.a. Asmari, s.d.a. Jumarta, s.d.a. Aman, s.d.a. Ento Sumarya, s.d.a. Hadcri. s.d.a. Rasman, s.d.a. Mas'an, di hukum dua tahun di Garut, Encum A, s.d.a. 26. Hatomi, s.d.a. Sueb, s.d.a. Encum B, s.d.a. Ja'i, s.d.a. Marhasan, s.d.a. Oko, s.d.a. Banda, s.d.a. Une, s.d.a. Sementara Osin. Oia, Suhatma dibebaskan setelah menjalani masa hukuman (Kutoyo, 1983).

Persidangan kasus tersebut dilakukan di beberapa pengadilan, di antaranya: Pengadilan Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Bandung, Cianjur, dan Jakarta. Kasus yang didakwakan dalam persidangan tersebut lebih menyoal mengenai keterlibatan tokoh-tokoh SI lokal dalam

peristiwa Cimareme serta berkaitan dengan adanya gerakan rahasia *Afdeeling B* (Preanger Bone, 1920). Persidangan ini menarik perhatian publik, sejak tahun 1920-1921 media masa Belanda ramai membicarakan kasus ini dan rakyat Priangan Timur pun juga sangat antusias mengikuti perkembangan kasus ini. Ini merupakan persidangan terbesar sepanjang sejarah rakyat Priangan Timur, banyak orang yang berdatangan di pengadilan Tasikmalaya dan Garut demi menyaksikan langsung proses persidangan. Peradilan kasus Cimareme dan *Afdeeling B* merupakan perangkap bagi para aktivis SI, dengan adanya kasus ini pemerintah Belanda menjadikan jalan untuk memporak-porandakan kekuatan pergerakan SI dari akar rumput sampai pucuk pimpinannya. Haji Gojali menantu Haji Hasan didakwa oleh pengadilan Garut dituduh terlibat dalam gerakan *Afdeeling B* serta berusaha melawan pemerintah dan menggulingkan kekuasaan (Nuraidah, 2023).

Kesimpulan

Masuknya kolonialisme Belanda ke Garut membawa dampak besar pada aspek sosial, politik, dan ekonomi masyarakat setempat. Sistem ekonomi uang dan pajak yang berat memperparah kondisi rakyat, sementara kebijakan kerja paksa serta diskriminasi dalam pendidikan memperdalam ketimpangan sosial. Kesadaran politik masyarakat tumbuh dengan munculnya organisasi seperti Sarekat Islam, yang menggalang perlawanan terhadap kebijakan kolonial. Ketimpangan ekonomi yang menguntungkan kolonial semakin memperburuk kesejahteraan rakyat, memicu pemberontakan seperti Peristiwa Cimareme.

Haji Hasan Arif memainkan peran sentral dalam memobilisasi perlawanan rakyat terhadap kebijakan kolonial Belanda yang menindas, terutama melalui kebijakan wajib jual padi yang memperburuk penderitaan masyarakat. Dengan mengandalkan pengaruhnya sebagai ulama dan tokoh masyarakat, ia mengorganisir perlawanan berbasis nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan *jihaḍ fi sabilillah*. Upayanya tidak hanya menjadi simbol perlawanan lokal, tetapi juga mencerminkan perlawanan yang lebih luas terhadap kolonialisme. Melalui strategi diplomasi, musyawarah, dan persiapan fisik maupun spiritual, perjuangan Haji Hasan Arif menunjukkan bahwa ulama memiliki peran krusial dalam menggerakkan kesadaran.

Peristiwa Cimareme menjadi bukti nyata perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan dan ketidakadilan kolonial. Meskipun pemerintah kolonial Belanda berupaya menekan perlawanan ini dengan kekerasan, penangkapan, serta persidangan yang berat sebelah, semangat perjuangan rakyat tetap berkobar. Sikap heroik yang ditunjukkan oleh Haji Hasan Arif dan para pengikutnya mencerminkan keteguhan untuk mempertahankan harga diri dan kebebasan, meskipun harus menghadapi risiko kematian dan pemenjaraan. Peristiwa ini juga menunjukkan bagaimana kolonialisme berusaha melemahkan pergerakan nasional dengan mengkriminalisasi tokoh-tokoh perlawanan, termasuk yang terkait dengan Sarekat Islam.

Daftar Rujukan

Abdurahman, D. (2019). *Metodelogi Penelitian Sejarah Islam*. Ombak.

Gonggrijp G. (1967). *Schets eener economische geschiedenis van Nederlandsch-Indie*, Terjemahan Drs. Dharmono Hardjowidjojo. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

Hardjasaputra, A. S. (1990). *Dinamika Kehidupan Sosial-Ekonomi di Priangan, 1870-1906*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia or Department Ministry

- of Education and Culture of the Republic of Indonesia. In *Seminar Sejarah Nasional V: Subtema Sejarah Sosial-Ekonomi*.
- Hayati, C. (1990). *Peristiwa Cimareme Tahun 1919: Perlawanan Kyai Hasan terhadap Peraturan Pembelian Padi*. Universitas Gadjah Mada.
- Hidayat, A. A. (2015). *Kerusuhan Anti Cina di Kota Garut Tahun 1963*. Universitas Indonesia.
- Iskandar, M. (2001). *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat*. Penerbit Matabangsa.
- Iskandar, M. (2010). Islam Fobi dan Aksi-aksi Radikal. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 1(1), 73-87. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v1i1.6>.
- Kaoem Moeda, 26 Januari 1920.
- Kartodirdjo, S. (1972). *Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia pada Abad 19 dan Abad 20*. Universitas Gadjah Mada.
- Katam, S., & Rachmat A. (2013). *Album Garoet Tempo Doeloe*.
- Koch, D.M.G. (1951). *Om de Vrijheid, Terjemahan Abdul Muis*. Pembangunan.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Kutoyo, S. (1983). *Haji Hasan Arif Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Naskah Panitia. (1973). *Peristiwa Pemherontakan Haji Hasan Aricf. Talum 1918, Ciinarerne, Garut*.
- Nuraidah, S. (2023). *Peristiwa Cimareme hingga Pemberontakan Sarekat Rakyat di Garut (1918-1926)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Preanger Bone, 9 Februari 1920.
- Rochmat, S. (2009). *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Graha Ilmu.
- S, A. S. (1969). *Suatu Tindjauan Sedjarah Mengenai Latar Belakang Terdjadinya Peristiwa Tjimoreme*. Fakultas Keguruan Ilmu Sosial Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Sardjono. (1968). *Biography H.M. Djamhari Garut*.
- Sarekat Islam Lokal. (1975). *Arsip Nasional Republik Indonesia*.